

PERKEMBANGAN BISNIS PERBIOSKOPAN DI KUDUS MASA ORDE BARU: 1966-1998

THE DEVELOPMENT OF THE CINEMAS BUSINESS IN KUDUS DURING THE NEW ORDER : 1966-1998

Oleh: Isna Zulvia, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, isnazulvia8@gmail.com

Abstrak

Bioskop di Kabupaten Kudus ada sejak awal tahun 1900-an, lebih tepatnya ketika masa penjajahan Belanda. Kejayaan industri perbioskopian di Kudus terjadi pada masa Orde Baru. Banyaknya bisnis perbioskopian di Kudus ditandai salah satunya dengan maraknya gedung bioskop di Kudus. Perkembangan bisnis perbioskopian di Kabupaten Kudus disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu situasi politik, kepemilikan modal, regulasi pemerintah dan perkembangan teknologi. Selain itu, terjadi monopoli dalam bisnis perbioskopian, sehingga hanya perusahaan besar yang dapat bertahan. Usaha pengelolaan bioskop menjadi salah satu usaha yang menguntungkan pada masa tersebut. Banyak pengusaha mendirikan gedung bioskop di kawasan strategis. Industri perfilman juga dalam masa kejayaannya, dikarenakan produksi film mengalami pertumbuhan pada setiap tahunnya. Kejayaan bisnis perbioskopian ini tidak berlangsung lama, bisnis ini pada awalnya memberikan keuntungan yang cukup besar namun pada akhirnya membawa kerugian. Penyebab keruntuhan bisnis perbioskopian ini diantaranya adalah munculnya televisi swasta dan peredaran VCD dan DVD, juga munculnya Grup 21.

Kata Kunci: *Perbioskopian, Kudus, Orde Baru*

Abstract

Cinemas in Kudus regency existed since the early 1900's, precisely during the dutch colonial period. The glory of the cinema business in Kudus was marked by the emergence of cinemas in Kudus. The developement of the cinema business in Kudus district is caused by several factors, such as the political situation, capital ownership, goverment regulation, and technological developments. Besides thta, there was a monopoly in the cinema business, so only large companies could survive. Cinema management business is a profitable business at that time. Entrepreneurs set up cinemas in strategic areas. The film industry was also in its heyday because film production had grown. Every year, the glory of the cinema business begims to dim. This business initially provided considerable profits, but ultimately suffered a loss. The cause of the collapse of the cinema business was the emergene of private television, circulation of VCD's and DVD's and the presence of groups 21.

Keywords: *Cinemas, Kudus, The New Order*

Pendahuluan

Film merupakan suatu usaha merekam pertunjukan dari suatu kisah atau peristiwa yang diperagakan oleh manusia, film juga disebut dengan gambar *idoep*. Berbicara tentang film tidak dapat dilepaskan dari adanya bioskop sebagai penghadir film tersebut ditengah masyarakat. Bioskop merupakan tempat untuk menonton pertunjukan film menggunakan layar lebar, gambar film kemudian diproyeksikan ke layar dengan menggunakan proyektor.¹ Dengan adanya bioskop, maka ada pertemuan antara jasa penyedia informasi berupa film dengan penonton sebagai konsumen dari film itu sendiri, sehingga hal tersebut memiliki arti bahwa bioskop adalah ujung mata dari rantai perfilman.

Film pertama kali terdapat di Prancis oleh Lumiere bersaudara, dimana Lumiere bersaudara melakukan pemutaran film pertama kali di Cafe de Paris pada tanggal 28 Desember 1895. Sedangkan perfilman di Indonesia mulai masuk pada akhir abad ke-19 dan mulai dikenal pada abad ke-20. Film pada saat itu lebih dikenal dengan istilah "gambar *idoep*" dan mulai ditayangkan di bioskop-bioskop Indonesia, seperti bioskop pertama di Indonesia yang berada di Batavia.² Film pertama yang diputar di Indonesia adalah film dokumenter³, kemudian seiring berkembangnya teknologi dari Eropa dan Amerika muncullah film-film luar selain dokumenter di Indonesia. Pada saat itu film dipertontonkan secara berpindah-pindah dari satu gedung ke gedung yang lain, karena belum memiliki tempat yang

tetap.⁴

Dunia perbioskopian mengalami masa puncak produksi pada tahun 1950-an, dengan 65 judul film diproduksi pada tahun 1955.⁵ Hal tersebut juga mendukung diselenggarakannya Festival Film Indonesia pertama pada bulan Mei tahun 1955. Kesuksesan film di Indonesia akibat dari banyaknya jumlah film luar yang masuk dan beredar di bioskop-bioskop Indonesia. Amerika menjadi salah satu pengimport film yang besar di Indonesia, melalui agen AMPAI (*American Motion Pictures Association Indonesia*). Akan tetapi setelah adanya Festival Film Indonesia pertama, pada tahun 1956 dunia perfilman Indonesia justru mengalami penurunan jumlah produksi akibat dari adanya konflik dalam negeri.

Akhir dari pemerintahan Soekarno film diwarnai banyak tekanan politik dan PKI melalui organisasi dibidang seni dan kebudayaan atau sering disebut LEKRA (*Lembaga Kebudayaan Masyarakat*). Pada 7 Mei 1964, LEKRA secara besar-besaran melakukan boikot pada film-film produksi Amerika yang di import dari AMPAI, hal tersebut tentu saja membuat dunia perbioskopian termasuk bioskop di Yogyakarta mengalami sepi pengunjung.

Pada masa pemerintahan Soeharto, film mulai bangkit lagi termasuk perbioskopian juga mulairamai kembali. Soeharto mulai merancang beberapa kebijakan sebagai upaya untuk memajukan kembali dunia perfilman dan perbioskopian di Indonesia.⁶ Melalui keputusan Menpen No.71/SK/M/1967 pada tanggal 15 Desember 1967, pemerintah mewajibkan seluruh importir film membeli saham produksi dan rehabilitasi perfilman

¹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka 2001), hlm. 134.

²Misbach Yusa Biran, *Sejarah Film 1900-1950 Bikin Film di Jawa*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm.27.

³M. Sarief Arief, *Politik Film di Hindia Belanda*, (Depok: Komunitas Bambu, 2009), hlm 13.

⁴*Ibid.*,

⁵J.B Kristanto, *Katalog Film Indonesia 1926-2007*, (Jakarta : NALAR, 2007), hlm. 37.

⁶Endi Zulkarnaen, "Bioskop di Kota Klaten 1950-an –2000-an" , *Skripsi*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2013), hlm.7

nasional seharga Rp. 250.000 bagi setiap judul yang mereka import mulai 1 Januari 1968. Hal tersebut sengaja diberlakukan pemerintah agar jumlah produksi film dalam negeri mengalami peningkatan. Usaha pemerintah Orba untuk dunia film dan bioskop juga tercermin dengan dibentuknya DPFN (*Dewan Prduksi Film Nasional*), anggotanya sendiri adalah orang-orang pemerintahan dan juga orang-orang swasta perfilman.⁷

Pada tahun 1970, industri film mulai memproduksi film-film yang berbau sensual yang mengumbar nafsu serta erotisme.⁸ Salah satu film yang diproduksi berjudul *Bernafas dalam Lumpur*, yang dibintangi oleh Suzzana. Pada tahun 1970-1980 Suzzana berhasil meramaikan layar bioskop Indonesia melalui film-film yang dibintanginya, ia menjadi aktris yang mendominasi film-film pada tahun tersebut.

Pada masa orde baru, bioskop-bioskop di Indonesia, tak terkecuali di Kudus, mendapat banyak keuntungan dari masyarakat yang datang untuk menonton film baik dalam maupun luar negeri. Pada saat itu, di Kudus sudah memiliki 3 gedung bioskop. Gedung bioskop tersebut antara lain adalah gedung bioskop Garuda yang mana dulunya gedung tersebut bernama Gedung Gren. selanjutnya ada gedung bioskop ramayana yang dulunya adalah Gedung Karya, dan yang terakhir adalah Gedung Ria atau dulunya adalah Gedung Den.

Pada masa orde baru, antusias penonton bioskop dapat dikatakan cukup tinggi, terbukti dengan adanya jumlah bioskop di Kudus yang mengalami peningkatan dari 3-12 gedung bioskop. Bagi pemilik bioskop tak menjadi masalah

film apa yang dipertontonkan, asal ketersediaan film untuk di putar dapat terpenuhi, agar tidak terjadi kekosongan pelanggan yang nantinya membuat bioskop mengalami kemrosotan.

Tahun 1990-an bisnis bioskop Indonesia mengalami kemrosotan, tak terkecuali yang ada di Kudus. Kemunduran tersebut dikarenakan mulai munculnya televisi swasta (RCTI,SCTV,TPI), video tape, laser disc⁹, VCD, antena parabola, dan media pemutar film lainnya. Hal tersebut membuat pelanggan bioskop enggan datang ke bioskop untuk menonton film.¹⁰

Usaha bioskop di Indonesia dikelola dengan bisnis murni dimana unsur dagang lebih besar daripada untuk memajukan film Indonesia. Adanya bioskop yang semakin banyak dan produksi film nasional yang belum memadai serta danya kepentingan untuk menjaga usaha bioskop dengan memutar film import menjadikan kondisi perbioskopian Indonesia mengalami fluktuatif.¹¹ Selain itu pemerintah dengan bebas dan mendukung para pemilik modal untuk mendirikan gedung bioskop, hal tersebut dimanfaatkan orang keturunan China untuk mendirikan bioskop tak terkecuali bioskop-bioskop yang ada di Kudus.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas tentang

⁹Laser disc merupakan teknologi kaset

yang memiliki tampilan gambar lebih tajam, kualitas suara lebih jernih dan belum ada teknologi yang mampu menyensor lainnya. Lihat dalam Ilmia Safitri. "*Bisnis perbioskop di Yofayakarta 1966-1998*" , Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm.7

¹⁰Eric Sasono, et. al., *Menjegal Film Indonesia: Pemetaan Ekonomi Politik Industri Film Indonesia* , (Jakarta:Rumah Film dan Yayasan Tifa : 2011), hlm. 85.

¹¹Novi Kurnia, dkk, *Menguak Peta Perfilman Indonesia* (Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata REpublik Indonesia,2004), hlm, 97.

⁷*Ibid.*,

⁸Muhammad Bayu Widagdo, "Peran Pemerintah Dalam Pembuatan Kebijakan Perfilman Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi", *Tesis*. (Semarang: Universitas Diponegoro), hlm. 40.

Perkembangan Bisnis Bisokop Kudus pada tahun 1966-1998 alasan penulis memilih Kudus sebagai tempat penelitian ini adalah karena banyaknya jumlah bisokop milik Cina dan pribumi yang ada di Kudus. Sedangkan tahun 1966-1998 dipilih, karena pada tahun tersebut bioskop di Kudus mulai menampakkan kebinarannya hingga pada tahun 1993 bioskop yang ada mencapai 12 gedung, dan pada tahun 1997 bioskop mulai meredup yang pada akhirnya meninggalkan 4 gedung bioskop saja di tahun 1998.

METODE PENELITIAN

Metode sejarah merupakan suatu proses untuk menguji dan mengkaji kebenaran rekaman sejarah dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis terhadap data yang ada sehingga menjadi penyajian da cerita yang dapat dipercaya.¹² Metode sejarah juga dapat merekonstruksi sebanyak-banyaknya peristiwa masa lampau manusia.¹³ Penelitian ini menggunakan empat tahapan penelitian. Empat tahapan penelitian menurut Kuntowijoyo yang digunakan pada penelitian ini antara lain; pengumpulan data (Heuristik), kritik sumber (Verifikasi), penafsiran (Intepretasi), dan penulisan sejarah (Historiografi).¹⁴

Heuristik merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu suatu kegiatan yang mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data atau materi sejarah. Tahap kedua kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan

otentisitas dan kredibilitas sumber. Kritik sumber terbagi menjadi dua, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Tahap ketiga interpretasi adalah penafsiran terhadap fakta-fakta yang sudah diperoleh melalui tahap kritik sumber. Melalui tahap interpretasi kemampuan intelektual sejarawan benar-benar diuji dikarenakan tahapa ini sering dijadikan pemicu subjektifitas. Tahap terakhir historiografi merupakan proses menceritakan rangkaian fakta dalam sebuah bentuk tulisan yang bersifat historis, ditulis dengan kronologis berdasarkan hasil yang didapat peneliti setelah melewati tahap heuristik, kritik sumber dan interpretasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEADAAN UMUM KABUPATEN KUDUS ABAD 20

Berbicara tentang bioskop tidak bisa dipisahkan dengan film, sebab bioskop adalah tempat menonton pemutaran film. Film muncul di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19. Hal tersebut terbukti dari adanya sebuah iklan di harian Bintang Betawi pada 5 Desember 1900. Film pertama yang diputar di Indonesia adalah film dokumenter. Sampai tahun 1902 belum ada satu pun usaha untuk membuat sebuah film cerita bisu yang menampilkan aktor/aktris. Film cerita, baru muncul pada tahun 1903.

Pada mulanya film yang dipertunjukan di Hindia Belanda tidak menunjukkan adanya tanggapan baik dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan, pertama film saat itu bukan suatu bentuk pertunjukan yang komunikatif lisan sifatnya. Kedua, penonton diperlihatkan pada satu bentuk pertunjukan yang tidak secara menyeluruh diketahui orang-orangnya. Ketiga, karena tidak adanya komunikasi lisan mengakibatkan pertubjukan film ini tidak dapat diketahui pembicaraan dan pesan-pesan yang ingin disampaikan.

Pada tahun 1901 pemilik tempat pertunjukan membuar kebijakan untuk

¹²Helius Sjamsuddin dan Ismaun, *Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 61.

¹³Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Mega Book Store, 1984), hlm. 22-23.

¹⁴Abd Rahman Wahid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 43.

menurunkan harga tiket masuk. Kebijakan pemilik tempat pertunjukan film ini secara kebetulan bersamaan dengan adanya larangan bagi pertunjukan wayang di Batavia. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perkembangan pertunjukan film pada tahun-tahun berikutnya, dan juga bertambahnya jumlah bioskop yang ada di Batavia. Selain di Batavia, di Padang pun hingga tahun 1905 memiliki 3 tempat pertunjukan film atau lebih dikenal dengan istilah bioskop. Bertambahnya tempat pertunjukan film atau bioskop ini menyebabkan jumlah importir film turut meningkat. Mulanya di Batavia hanya ada satu importir film, namun pada tahun 1905 terdapat 3 importir film di Batavia.

Bioskop zaman dulu bermula di sekitar Lapangan Gambir (sekarang Monas), yang mana bangunanya menyerupai bangsal dengan dinding gedek dan beratapkan kaleng /seng. Selesai pertunjukan film, bioskop kemudian dibawa berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, bioskop ini bernama Talbot. Bioskop lain yang ada di Indonesia masa itu berada di Tanah Abang, yang bertepatan di sebuah gedung di Pasar Baru. Bioskop tersebut menjadi cikal bakal gedung-gedung bioskop di Indonesia. Sehingga Semenjak saat itu bioskop mulai marak di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Kudus.

Seiring berkembangnya teknologi Eropa dan Amerika muncullah film-film luar negeri yang mulai masuk ke Indonesia. Barulah setelah film-film luar bermunculan di Indonesia, Indonesia mulai memproduksi film sendiri. Pertumbuhan seni pertunjukan termasuk film tidak lepas dari pertumbuhan kota, teknologi dan juga industri. Kota-kota di Jawa menjadi persinggahan kelompok sirkus, orkestra dan lain-lain. Kekuasaan Voc yang menguasai wilayah ekonomi Hindia Belanda menjadikan berbagai kerajaan di Jawa mundur ekonominya. Situasi krisis semacam ini dimanfaatkan oleh pedagang Tionghoa bernama Gan Kam untuk "menjual" seni pertunjukan keraton, seperti

wayang orang ke luar keraton dan menjadi tontonan rakyat. Kolonialisme Belanda juga membawa pengenalan film dokumenter yang tidak terlalu populer di Indonesia yang terbiasa berbudaya tutur fiksi layaknya seni pertunjukan lainnya. Film muncul pada masa pendudukan Belanda sekitar akhir abad ke-19.

Bioskop di Kudus sendiri ada muncul pada tahun 1920-an¹⁵ dengan nama Bioskop Gren, milik keturunan Cina yang tinggal di Kudus. Lokasi gedung bioskop ini berada ditengah kota, lebih tepatnya di timur alun-alun kota. Hampir sama dengan bioskop di wilayah lainnya, penonton yang hadir berasal dari kalangan tertentu. Bioskop Gren ini menjadi cikal bakal dari berdirinya bioskop-bioskop di Kudus. Para pengusaha mencoba membangun gedung bioskop lantaran melihat kesuksesan dari Bioskop Gren tersebut. Munculnya bioskop lain selain Gren dapat dikatakan lambat, hal tersebut dikarenakan harga tiket yang mahal sehingga minat menonton bioskop masih sangat rendah.

Tahun 1930-an mulailah muncul bioskop-bioskop lain di Kudus, diantaranya ialah Bioskop Karya dan Bioskop Den. Hampir sama dengan Bioskop Gren, kedua bioskop ini dikelola oleh seorang keturunan Cina yang tinggal di Kudus. Perbedaan yang cukup terlihat pada bioskop ini ialah, bioskop Gren memiliki tingkatan bioskop lebih tinggi dikarenakan fasilitas yang dimiliki lebih baik daripada kedua bioskop yang lain.

Film Indonesia mulai digemari setelah produksi film mengalami panen untuk kali pertamanya, yaitu pada tahun 1941. Keadaan tersebut tidak bertahan lama, pada tahun 1942 tepatnya pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Dari 30 judul film yang diproduksi pada masa tersebut, hanya tersisa 3 judul film saja di tahun 1942. Gedung bioskop di Indonesia banyak yang di tutup, sebagaimana gedung bioskop berubah menjadi gudang dan yang

lainnya terbengkalai.¹⁶

Pada masa kedudukan Jepang, Pemerintahan Jepang mewajibkan semua bioskop menyediakan separuh (50%) tempat duduk untuk kelas rakyat. Selama menududuki Indonesia, Jepang lebih banyak membuat film penerangan dan propaganda seperti film *Berdjoeang, Di Desa dan Di Menara*.¹⁷ Pemerintahan juga menyetop film impor dari Amerika Serikat dan sekutu lainnya, sehingga hanya memutar film-film produksi Jerman (sekutu Jepang) yang diambil dari peredaran masa sebelum Perang Dunia II.¹⁸

Keadaan seperti itu tidak berlangsung lama, sebab setelah Jepang kalah melawan Sekutu dengan dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki maka Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Perubahan pemerintahan tentu juga akan mengubah struktur berbagai bidang didalamnya. Bisnis perbioskopian dan perfilman mengalami berbagai perombakan dalam berbagai sisi.

Usaha bioskop mengalami pemulihan kembali. Urusan perfilman dipegang oleh Departemen Penerangan yang kala itu dirangkap jabatan oleh Menteri Keamanan Rakyat. Tugas dari departemen tersebut antara lain melakukan kontra propaganda, propaganda, pencatatan dan penerbitan. Kebijakan ini tertuang dalam Maklumat

Pemerintah 14/11/1945.¹⁹ Beberapa bioskop bertempat di wilayah kekuasaan NICA, tetapi pemilik bioskop tetap menggunakan uang rupiah bukan gulden untuk pembelian tiket. Selain itu, pemilik bioskop juga memberikan sebagian hasil penjualan tiket untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia, hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok pertunjukan sandiwara.²⁰

Pada tahun 1946, Soekarno melakukan nasionalisasi terhadap nama-nama bangunan milik negara maupun swasta, tak terkecuali gedung bioskop yang ada di Kudus. Gedung Bioskop Gren berubah menjadi Bioskop Garuda, disusul dengan gedung lainnya. Gedung Bioskop Karya berubah menjadi Ramayana, dan gedung Bioskop Den berubah menjadi Gedung Ria.

Tahun 1950-an merupakan tahun bangkitnya kembali gedung-gedung bioskop. Ini disebabkan oleh dua faktor utama, pertama, munculnya perusahaan perusahaan film yang dibuat oleh pribumi Indonesia sendiri. Kedua, lahirnya beberapa persatuan pengedar film seperti hadirnya Ikatan Pengedaran Film Indonesia (IPEFI) pada 19 Februari 1953, dengan ketuanya Mr. Liem Tong Kiat. Organisasi importir pun berdiri dengan nama Gabungan Importir Film Indonesia (GIFI).²¹ Tiap-tiap daerah mulai membangkitkan diri, tak terkecuali yang ada di Kudus. Para pengusaha bioskop Kudus mulai membangun kembali gedung-gedung bioskop baru.

Insan perfilman juga kemudian

¹⁶Haris Juahari, *Layar Perak 90 Tahun*

Bioskop di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 34.

¹⁷J.B Kristanto, *Katalog Film Indonesia 1926-1995*, (Jakarta: NALAR, 2007), hlm, 11-12

¹⁸Taufik Abdullah, dkk., *Film Indonesia Bagian I (1900-1950)*, (Jakarta: Dewan Film Nasional, 1993), hlm. 82.

¹⁹Novi Kurnia, *Menguak Peta Perfilman Indonesia*, (Yogyakarta:Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2004),hlm. 46.

²⁰Garin Nugroho dan Dyna Herlina S., *Krisis Paradoks Film Indonesia*, (Jakarta:FFTV-IKJ PRes, 2013), hlm. 83.

membentuk satu organisasi yang dinamakan Pusat Peredaran Film Indonesia (PPFI), dan berkantor di Jalan Tugu Kidul , 38, Yogyakarta, sedangkan untuk kantor Kementrian Penerangan bertempat di Kotabaru tepatnya berada satu kompleks dengan RRI Yogyakarta. Tugas PPFI adalah untuk membantu pemerintahan Republik Indonesia melalui penerangan lewat film di bioskop. Pada tahun 1948, Menteri Penerangan Republik Indonesia Mohammad Natsir mengeluarkan Surat Keputusan pada tanggal 4 Agustus 1948 yang berisi tentang PPFI dengan semua bagian-bagian dimasukkan ke dalam organisasi Kementrian Penerangan sebagai Jawatan Peredaran Film dan Eksploitasi Bioskop disingkat menjadi Jawatan Perfebi.

Banyaknya film impor yang masuk dan sesungguhnya diimbangi juga oleh produksi dalam negeri, maka bioskop- bioskop yang tadinya beralih fungsi, kini kembali aktif. ini tergantung pada keadaan gedungnya, lokasinya dan jenis film yang diputar.

Pada tahun 1964, situasi politik dalam negeri kurang kondusif menimbulkan keresahan dalam masyarakat, Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui Lembaga Keduayaaan Rakyat (Lekra) berlingung di belakang Soekarno menyatakan dukungannya terhadap ideologi Soekarno, seperti Manifestasi Politik (Manipol) dan Nasioanalis, Sosialis, Komunis (Nasakom). PKI perlahan melakukan penetrasinya dengan mendirikan Organisasi Pappias²² (Panitia

²²Pappias beridir pada Sabtu Legi , 9 Mei 1964 yang diketuai oleh Ny. RHA Hidayat, dan wakilnya Dr. Ny. U. Suryadarma, Sitor Situmorang, Joeber Ajaeb, A. Addy, dan Ny. Arudji Kartawinata serta tokoh-tokoh "dekat" PKI lainnya. Didirikannya PAPPFIAS penuh dengan tujuan politis daripada tendensi memajukan perfilman. Film dijadikan "pintu masuk" bagi pengaruh PKI terhadap masyarakat dalam bidang kebudayaan karena mereka menganggap kemungkinan saingan PKI dalam film tidak banyak sehingga

Aksi Pengganyangan Film-Film Imperialis Amerika Serikat).

Berdirinya pappias merupakan awal mula masa kelam dunia perfilman di Indonesia. Penurunan tajam jumlah penonton dan banyaknya kerusakan serta kekacauan di gedung-gedung bioskop yang tidak kondusif lagi untuk dijadikan tempat hiburan. Keresahan benar-benar dirasakan , setelah AMPAI dibubarkan oleh Pappias pada tanggal 17 Agustus 1964. Kedudukan PKI dan simpatismannya menjelang pemberontakan G30S semakin kokoh dari hari ke hari. Hal ini berpengaruh terhadap perfilman dan perbioskopian di Indonesia. Pappias lewat koran-koran yang dikuasai PKI dan para simpatismannya, terus saja mengganyangi tokoh-tokoh perfilman, kesenian, dan kebudayaan yang berada di kubu PKI.

Peristiwa G30S PKI mengacaukan tatanan politik, ekonomi, kebudayaan , sebagai puncaknya merupakan dua hal utama penyebab kemerosotan bisnis perbioskopia di Indonesia. Hal ini ditandai dengan ditutupnya sejumlah bioskop di Indonesia, pada kurun waktu 1962-1965 terdapat 540 dan pada tahun 1965 hanya tersisa 350 buah.²³ Keadaan seperti ini berakhir, hingga pemerintahan Soekarno di Indonesia.

B. PENGARUH BISNIS PERBIOSKOPAN DI KUDUS TAHUN 1966-1980

Bisnis perbioskopian di Kudus bermula sejak masa penjajahan di Indonesia. Di lansir dari beberapa sumber , bioskop mulai muncul di Indonesia pertama pada tahun 1900 di Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang kemudian mulailah bermunculan bioskop-bioskop lain di Indonesia. Di Kudus sendiri bioskop pertama yang dibangun adalah bioskop

memungkinkan tercapainya tujuan PKI dalam bidang kebudayaan. Haris Jauhari., *op., cit*, hlm. 67-69.

²³S.M Ardan, *Dari Gambar Idoep ke Sinepleks*, (Jakarta:GPBSI,1992). hlm. 54.

Gren milik seorang keturunan Cina. Bioskop ini dibangun pada tahun 1920-an dan berlokasi ditengah kota lebih tepatnya di samping alun-alun Kabupaten Kudus. Munculnya bioskop lain selain Gren dapat dikatakan lambat, hal tersebut dikarenakan harga tiket yang mahal sehingga minat menonton bioskop masih sangat rendah.

Tahun 1930-an mulailah muncul bioskop-bioskop lain di Kudus, diantaranya ialah Bioskop Karya dan Bioskop Den. Hampir sama dengan Bioskop Gren, kedua bioskop ini dikelola oleh seorang keturunan Cina yang tinggal di Kudus. Perbedaan yang cukup terlihat pada bioskop ini ialah, bioskop Gren memiliki tingkatan bioskop lebih tinggi dikarenakan fasilitas yang dimiliki lebih baik daripada kedua bioskop yang lain.

Film Indonesia mulai digemari setelah produksi film mengalami panen untuk kali pertamanya, yaitu pada tahun 1941. Keadaan tersebut tidak bertahan lama, pada tahun 1942 tepatnya pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Dari 30 judul film yang diproduksi pada masa tersebut, hanya tersisa 3 judul film saja di tahun 1942. Gedung bioskop di Indonesia banyak yang di tutup, sebagaimana gedung bioskop berubah menjadi gudang dan yang lainnya terbengkalai.²⁴

Pada tahun 1946 Soekarno melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset negara, pada saat itu Bioskop Gren berganti nama menjadi Bioskop Grauda. Selain itu, Bioskop Karya diganti nama menjadi Bioskop Ramyana. Bioskop Den berubah menjadi Ria. Tahun 1950-an bioskop di Kudus belum menjadi sesuatu yang begitu menarik bagi warga pribumi, yang menonton film kebanyakan dari kalangan Elit, dan orang-orang Tionghoa yang kaya. Banyaknya warga Tionghoa yang tinggal di Kudus dengan etos kerja yang tinggi turut membangkitkan dunia perbisnisan di Kudus salah satunya adalah

bisnis perbioskopian.

Selain warga elit Kudus, banyak pula masyarakat yang berasal dari kabupaten lain yang turut serta menonton pertunjukan film di bioskop-bioskop di Kudus. Kemajuan dibidang bisnis kabupaten Kudus memang jauh lebih pesat dibanding wilayah lain disekitar Kabupaten Kudus.

Kebangkitan dunia perfilman dimulai dengan terbentuknya Direktorat Film dalam Departemen Penerangan pada 1966. Setelah terjadi kekosongan film impor akibat aksi Pappias dan G30S PKI, diatasi dengan membuka "kran" impor dengan 274 judul film pada tahun 1965, 377 judul film pada tahun 1966 dan 499 judul film pada tahun 1967.²⁵ Tindakan ini dilakukan pemerintah untuk menghidupkan kembali dunia perbioskopian di Indonesia tak terkecuali di Kudus. Hal ini memberikan keuntungan bagi pihak Cina. Dikarenakan sebagian pemilik bioskop di Indonesia adalah keturunan Cina, termasuk di Kudus.

Bioskop lokal pada saat itu memiliki model "theatre" bukan model sinepleks²⁶, sehingga pada saat itu satu buah gedung hanya memiliki sebuah ruang eksepsi (1 layar) saja. Dekade 1970-an merupakan masa kejayaan bagi industri perfilman dan perbioskopian di Indonesia. Perbioskopian menjadi lahan bisnis yang menggiurkan bagi para pengusaha di Indonesia, termasuk di Kudus. Bioskop Garuda memiliki jumlah kursi kurang lebih 200 kursi. Gedung yang berlokasi tepat di satu sudut ditengah Alun-alun Kota Kudus ini menjadi gedung yang paling besar dan merupakan cikal bakal dari isnis

²⁵*Ibid.*, hlm. 74

²⁶Bioskop sinepleks dikenal sebagai "21" dikelola oleh perusahaan Subentra milik pengusaha Sudiwikatmono. Sinepleks adalah gedung bioskop dengan lebih dari satu layar, konsep satu gedung dengan empat ruang bioskop. Penjaga loket dan pintu bioskop terdiri dari perempuan-perempuan cantik dengan baju batik dan rok panjang.

²⁴Haris Jauhari, *Layar Perak 90 Tahun Bioskop di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992), hlm. 34.

perbioskopian di Kudus. Gedung bioskop ini merupakan milik keturunan Cina dan merupakan gedung bioskop elite. Terdapat perbedaan pada masing-masing kelas, kelas pertama atau balkon paling atas diberi harga Rp.600-700 . Kelas kedua atau balkon bagian tengah diberikan harga Rp.350-500. Dan pada kelas ketiga atau balkon paling depan diberikan harga Rp.200-300. Bioskop Grauda lebih sering menayangkan film-film Barat daripada film-film nasional.

Bioskop kedua yang cukup menarik minat pengunjung adalah bioskop karya yang berlokasi di Taman Bojana atau seberang Bioskop Grauda. Bioskop ini merupakan bioskop elit kedua yang ada di Kudus. Bioskop Karya lebih banyak menayangkan film-film India dari pada film Barat dan nasional.²⁷ Industri film Bollywood dan Hollywood memang berkembang sangat pesat hingga saat ini. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah masyarakat yang lebih tertarik untuk menonton film-film Bollywood dan Hollywood daripada film nasional. Karena kepentingan mencari keuntungan semata maka pihak pengusaha bioskop lebih banyak menayangkan film-film sesuai keinginan masyarakat. Sedangkan pada Bioskop Den atau Ria tidak mampu sebesar 2 bioskop lainnya.

Bioskop Ria atau Den berlokasi tidak jauh dari 2 bioskop sebelumnya. Bioskop ini milik swasta dan dikelola swasta, akan tetapi eksistensi bioskop ini tidak sekuat Bioskop Garuda dan Karya. Bioskop Ria pada tahun 1960-an terus memperbaiki infrastruktur dan fasilitas agar mampu bertahan dalam persaingan diantara ketiga bioskop tersebut. Lokasi yang strategis juga menjadikan Bioskop Ria ramai meskipun tidak seramai yang lain. Sistem pengelolaan hampir sama dengan bioskop yang lain. Bioskop Ria ini merupakan bioskop kelas bawah pada tahun 1950-an. Kemudian seiring diperbaikinya fasilitas bioskop Ria menjadi

bioskop kelas atas hal ini juga didukung oleh munculnya banyak bioskop kecil di tahun 1980-an nanti yang merupakan bioskop kelas bawah.

Pada dekade 1980-an peningkatan jumlah gedung bioskop mengalami pertambahan, hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah minat masyarakat menonton film di bioskop. Satu gedung bioskop muncul dengan nama Kudus Teater. Keempat lokasi gedung bioskop yang berada di Kudus ini berdekatan, hanya berkisar 1-2 Km dari lokasi satu ke lainnya. Setelah munculnya Kudus Teater pada dekade yang sama muncul pula gedung bioskop baru bernama Bioskop Citra, lokasinya tidak jauh didari Kudus Teater. Pada dekade ini merupakan masa puncak kejayaan dari bisnis bioskop dan film. Dari tahun ketahun jumlah bioskop mengalami pertumbuhan, setelah muncul Bioskop Citra, muncul pula Bioskop Ploso diakhir dekade 1980-an yang kini lokasinya telah menjadi pemakaman umum.

Banyaknya jumlah produksi film pada masa ini membuat banyak pengusaha terutama keturunan Cina turut memanfaatkan situasi yang ada. Enam gedung berdiri pada tahun 1980-an, baik gedung bioskop elit maupun tidak. Jumlah bioskop ini termasuk besar untuk kota seukuran Kudus, namun hal tersebut tidak lantas menyurutkan pendapatan perbioskopian. Pada masa ini usaha gedung bioskop di Kudus semakin menjamur. Usaha ini dianggap sebagai usaha yang sangat menguntungkan. Pada awal tahun 1980-an berdiri lagi gedung bioskop di Kudus yang berada di wilayah Ploso (kini lokasi gedung bioskop telah menjadi pemakaman umum).²⁸

C. PASANG SURUT BISNIS PERBIOSKOPAN DI KUDUS TAHUN 1980-1998

Pada tahun 1980-an bisnis perbioskopian di Kudus terus mengalami

peningkatan. Minat masyarakat terhadap hiburan ini dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. Setelah keempat bioskop mengalami kemajuan dan keuntungan yang besar, pada dekade 1980-an mulai muncul banyak bioskop kecil yang tersebar di Kudus.

Pada tahun 1970-an, banyak film impor yang mendukung usaha perbioskopian di Indonesia, tak terkecuali di Kudus. Pada masa itu, apabila tidak ada peraturan dan kewajiban bioskop memutar film nasional, maka film apapun yang akan diputar tidaklah menjadi sebuah masalah. Ketersediaan film menjadi hal yang sangat penting dalam bisnis perbioskopian ini. Jumlah bioskop secara umum mengalami peningkatan, hal tersebut dirasakan di Kudus yang semula hanya terdapat 4 bioskop, kemudian dari tahun ketahun jumlahnya semakin bertambah banyak. Hal tersebut dikarenakan para pengusaha bioskop melihat peluang yang baik dalam bisnis tersebut.²⁹ Pada kisaran tahun tersebut, kebijakan Departemen Penerangan mengenai sensor film dilakukan oleh per-provinsis, sehingga sebuah film bisa saja diputar di Jawa Tengah, tetapi tidak di Jawa Timur.

Di Jawa Tengah terdapat Sanggar Film dan Dwi Sendang, Sanggar Film mencakup 130 bioskop dan Dwi Sendang 41 bioskop. Sanggar Film juga ditunjuk oleh Asosiasi Importir Film Eroopa- Amerika untuk menjadi pengedar film bagi Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan kedudukan pusat di Semarang pada 1 Agustus 1986. Seperti yang dijelaskan Edy, kejayaan bioskop di Kudus salah satunya akibat dari penjualan film-film nasional yang diwajibkan ditonton oleh masyarakat.³⁰ Bioskop di Kudus umumnya buka pukul 08.00 dan film mulai diputar pada pukul 10.00 WIB.

Euforia masyarakat terhadap dunia hiburan berupa film yang dipertontonkan di bioskop ini memang mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Soeharto utamanya ada tahun 1970-1990 an. Jumlah penonton semakin banyak membuat pendapatan tiap bioskop mengalami peningkatan. Hal ini membuat pendapatan bioskop juga mengalami kenaikan. Edy menceritakan ketika masa kejayaan bioskop Grauda dan Karya, bioskop tersebut membutuhkan kurang lebih 15 pegawai setiap harinya. Selain itu, bioskop juga dibuka hingga malam, sehingga penonton yang tidak dapat menonton pada siang hari mereka masih dapat menonton di malam hari. Pada hari-hari tertentu seperti weekend (sabtu-minggu) harga tiket naik 25% dari biasanya, namun hal tersebut tidak menyurutkan antusias masyarakat untuk menonton di bioskop.

Masa Kejayaan dunia perbioskopian di Kudus ini pada masa pertengahan tahun Soeharto memrintah, para pengamat bioskop menyatakan bahwa pada tahun 1970-1991 disebut sebagai masa dimana usaha perbioskopian dalam persaingan gejolak teknologu canggih. Pemerintah memberikan toleransi terhadap film-film yang bertema seks dan memberikan kebebasan dalam imort film. Hal ini membuat bioskop menjadi ramai. Seperti Bioskop Gren ia lebih sering menayangkan film barat daripada film nasional, Bioskop Karya lebih sering menayangkan film-film India dari pada film barat dan nasional.

Pada dekade 1980-an bioskop di Indonesia mengalami peningkatan jumlah gedung. Dibangunnya gedung-gedung bioskop baru dikota besar juga turut dirasakan dikota kecil seperti Kudus. Perbaikan dan pembaruan gedung bioskop terus dilakukan seiring berkembangnya zaman. Kejayaan gedung bioskop dan perfilman di Indonesia sangat dirasakan pada dekade ini. Selain jumlah gedung yang bertambah, jumlah pembuatan film di Indonesia juga mengalami peningkatan. Film impor juga

²⁹Haris Jauhari, Haris Jauhari (ed), *Layar Perak 90 Tahun Bioskop di Indonesia*(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 111.

ramai dipertontonkan di Indonesia. Banyaknya film nasional yang muncul, dikarenakan longgarnya BSF dalam menangani hal sensor, baik film edukasi maupun non edukasi.

Pada awal tahun 1980-an berdiri sebuah gedung bioskop yang tidak begitu besar di wilayah Ploso. Gedung bioskop ini kemudian diberi nama Bioskop Ploso. Bioskop Ploso merupakan gedung bioskop dengan sasaran masyarakat menengah kebawah, sehingga fasilitasnya tentu saja berbeda dengan bioskop yang lain. Lokasi bioskop ini tidak begitu jauh dengan Bioskop Garuda. Munculnya bioskop ini menjadi awal mula berdirinya bioskop-bioskop kecil lain yang tidak diketahui secara pasti kapan berdiri dan sistem kepengolalaanya.

Pada dekade 1980-an hingga 1990-an tercatat ada 12 gedung bioskop tersebar di Kudus. Bioskop ini merupakan bioskop gabungan dari ke 6 bioskop besar yang lebih dulu ada di Kudus. Bioskop ini berada dibawah naungan bioskop-bioskop besar yang lain. Seperti Bioskop Ploso karena merasa mendapat keuntungan yang cukup banyak ia lalu membuka 3 gedung bioskop lain yang berlokasi tidak jauh dari gedung utama. Kemudian Kudus Teater juga kemudian memiliki 1 gedung lagi tepatnya di sebelah timur gedung Teater.

Sedangkan 2 gedung bioskop lainnya ialah milik Grup 21 yang mulai merambah di Kudus, saat itu berlokasi di pusat perbelanjaan di Kudus yang berada di Kecamatan Jati. Lokasi 2 gedung ini tidak jauh dari lokasi gedung Bioskop Ploso. Lokasi yang tidak jauh antara satu gedung dengan gedung yang lain ini lantaran luas wilayah Kabupaten Kudus yang kecil. Perjalanan bisnis perbioskopian di Kudus mengalami kenaikan yang cukup cepat dirasakan, dan sangat cepat pada dekade 1980-1990-an.

Jumlah pengunjung yang semakin banyak, menjadikan pendapatan usaha bioskop semakin mengalami peningkatan. Film-film nasional dan import yang ditayangkan di bioskop lebih longgar

dalam penyensorannya sehingga para pengunjung lebih bebas memilih selera film yang diinginkannya. Dari data yang didapat tahun 1980-1990 merupakan tahun kejayaan dari bisnis perbioskopian di Kudus. Pada tahun ini televisi masih menjadi barang mahal dan hanya satu saluran yang dikelola pemerintah.

Kejayaan dunia perfilman menjadi daya tarik tersendiri untuk para pengusaha membuka bisnis perbioskopian, pada tahun 1990-an di Kudus jumlah bioskop mengalami puncaknya. Terdapat 12 gedung bioskop di Kudus yang tersebar diberbagai wilayah. Jumlah ini sangat besar untuk kota seukuran Kudus. Hal ini disagkut pautkan oleh masyarakat Kudus dengan etos kerja orang Kudus yang cukup tinggi. Dengan penghasilan yang tinggi pula maka masyarakat merasa tidak masalah jika untuk membayar hiburan seperti bioskop. Sebelas bioskop ini kini gedungnya tidak lagi dapat dilacak keberadaanya, karena sebagian telah menjadi pemukiman warga, ada pula yang menjadi pemakaman umum.

perbioskopian di Kudus pada tahun 1990-an mengalami kemerosotan yang cukup signifikan. Gedung bioskop di Kudus pada tahun 1993 terdapat 12 menurun menjadi 4 pada tahun 1998. Bioskop yang masih bertahan antara lain ada bioskop-bioskop tua sebagai pelopor bioskop yang ada di Kudus. Bioskop Garuda, Bioskop Karya, Bioskop Ria dan Bioskop Plasa. Tahun 1998 merupakan tahun dimana Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, hal tersebut tentu saja membuat perubahan diberbagai bidang di pemerintahan. Selain itu penyebab lesunya bisnis perbioskopian di Kudus tidak lain adalah maraknya peredaran televisi, antena parabola, video tape, laser disc, dan media-media pemutar film lainnya. Kerugian yang cukup besar membuat para pengusaha bioskop gulung layar.³¹

³¹ Ilmia Safitri, "Bisnis Perbioskopian di Kota Yogyakarta Tahun 1966-1998", Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 87.

Kondisi yang berkembang pada tahun 1990-an ini menyebabkan pengusaha bioskop melakukan pertahanan pada usaha mereka. Berkembangnya teknologi seperti adanya kaset video atau VCD, munculnya antena parabola dan DVD membuat para pemilik bioskop harus memiliki strategi khusus agar tetap bisa bertahan. Para pemilik televisi juga mulai marak, mereka lebih banyak menyaksikan sajian film dari televisi bahkan berita mancanegara sekaligus.³² Kebijakan yang diterapkan oleh Soeharto memberikan dampak terhadap seluruh sektor dalam negeri.

Usaha bioskop mulai redup secara universal di seluruh Indonesia. Kenaikan harga yang melambung dan kerusuhan akibat demonstrasi pemerintahan dalam aksi penurunan Soeharto menjadikan produksi film nasional tersendat dan impor film juga menjadi sulit. Produksi film menjadi 11 film dalam setahun. Runtuhnya masa ini pada tahun 1998 dan digantikannya oleh B.J Habibie menandai berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi. Hal ini membuat sistem pemerintahan dalam bidang apapun mengalami perombakan, tak terkecuali pada bidang hiburan seperti film dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Bioskop pertama kali hadir di Kabupaten Kudus pada tahun 1920-an, yang kala itu masih bernama Gren. Pemiliknya adalah keturunan Cina yang hidup di kabupaten Kudus. Sebelum adanya bioskop ini, masyarakat hanya menyaksikan hiburan-hiburan berupa ketoprak, wayang, dan lain sebagainya. Mulanya pemilik Bioskop Gren ini hanya ingin membuat tempat pertunjukan film, akan tetapi pada masa Orde Baru, berubah menjadi ladang usaha yang cukup menjanjikan bagi para pengusaha. Pada masa Kolonial, Jepang bahkan Pasca

Kemerdekaan bioskop masih sangat sederhana. Fasilitas yang diberikan masih sangat terbatas. Harganya pun mahal, sehingga hanya kaum elit yang mampu menonton film di bioskop. Selain itu film yang ditayangkan adalah film dokumenter yang tidak memiliki suara.

Memasuki tahun 1960-an perbioskopian di Kudus mulai ramai dengan hadirnya Bioskop Karya yang berlokasi di seberang Bioskop Gren di tengah kota. Pada masa Soekarno industri lokal semakin mendapat perhatian. Fasilitas mulai diperbaiki dan film-film yang dipertontonkan semakin baik. Penonton mulai banyak yang berdatangan, untuk mencari hiburan setelah bekerja seharian. Sejak ramainya minat masyarakat terhadap film di bioskop bioskop berubah menjadi ladang usaha bagi para pemilik uang untuk membangun bisnis ini. Diharapkan dari adanya bisnis perbioskopian ini pemilik usaha dan pengelolanya akan mendapatkan banyak keuntungan.

Pasang surut usaha perbioskopian terlihat pada tahun 1965, dimana pada tahun itu terjadi kekosongan film di bioskop yang ada di Kudus. Hal ini merugikan pemilik usaha bioskop, sebab banyak penonton yang kecewa dan tidak mau menonton film yang sudah pernah diputar. Adanya pemberhentian import film dari Amerika membuat bioskop tidak memiliki stok film untuk dipertontonkan pada masyarakat. Pappias melarang untuk pemutaran film di bioskop, hingga akhirnya Pappias dibubarkan dan lengsernya pemerintahan Orde Lama Soekarno. Pasca Orde Lama, maka pemerintahan berganti ditangan Soeharto dan pemerintahan berganti nama menjadi Orde Baru, pada pemerintahan ini banyak memberikan kebijakan yang mampu mendobrak dunia perbioskopian lagi.

Pada masa Orde Baru, banyak kebijakan yang menguntungkan bagi pebisnis bioskop dan juga film di Indonesia tak terkecuali dirasakan di Kudus. Banyak bioskop yang muncul

³²Garin Nugroho dan Dyna Herlina S, *op. cit.*, hlm. 239.

seperti Bioskop Plasa, Bioskop Ria, dan bioskop kecil lain yang tidak ada namanya. Semakin banyaknya antusias masyarakat terhadap film membuat banyak keturunan Cina melihat peluang ini untuk dijadikan usaha dan mencari banyak keuntungan semata. Dari tahun ketahun bisnis ini semakin banyak dan semakin besar. Iklan mengenai film yang akan dipertontonkan di Kudus banyak terlihat di sudut kota berupa poster, baliho, dan lain sebagainya.

Para pemilik usaha memiliki banyak cara untuk mempromosikan film yang akan dipertontonkan di bioskop masing-masing, bahkan ada karyawan bioskop yang ditugaskan untuk berkeliling menggunakan sepeda untuk memberitakan film yang akan segera tayang. Hal ini memperlihatkan bahwa hiburan bioskop disenangi oleh masyarakat Kudus karena belum ada hiburan alternatif lain yang disuguhkan seperti bioskop. Dibukanya kran film impor dan longgarnya adegan seks dalam produksi film, belum adanya VCD dan DVD menjadikan bioskop sangat digemari masyarakat sebagai sarana hiburan.

Kebijakan masa Pemerintahan Orde Baru ini memberikan kemajuan bagi bisnis perbioskopian dan perfilman di tanah air. Terlebih ketika adanya kewajiban untuk menonton film nasional, hal ini sangat menguntungkan bagi pemilik usaha bioskop. Tahun 1967 pemerintah juga menyuplai bioskop dengan film-film luar yang membuat bioskop kembali ramai dan dapat bernafas kembali. Pada tahun ini film nasional masih kalah dengan film Amerika, sehingga bioskop lebih banyak menayangkan film Amerika daripada film nasional. Pemerintah juga menghapuskan pajak tiket masuk bioskop agar bioskop banyak mendapatkan keuntungan. Pada masa orde baru pemerintah juga memberikan kelonggaran bagi gunting sensor dunia perfilman.

Kelonggaran gunting sensor ini mengakibatkan banyak film yang bergenre

pornografi, action banyak dipertontonkan dan sangat digemari oleh masyarakat. Hal ini menjadikan pemilik usaha bisnis bioskop mengalami keuntungan yang besar. Tujuan pemerintah memebrikan kelonggaran ini adalah agar film berbau ideologi yang bertentangan dengan Orde Baru tidak ditayangkan kembali. Film nasional berbau propaganda banyak diproduksi dan menjadi wajib untuk ditonton. Hal ini selain menguntungkan bagi pemerintahan Soeharto juga menguntungkan bagi pemilik bioskop.

Pada masa akhir dari pemerintah Soeharto, industri bioskop di Kudus mengalami kelesuan yang diakibatkan oleh banyak faktor. Baik faktor intern maupun ekstern menjadikan banyak usaha bioskop banyak yang gulung tikar. Faktor internal yang mempengaruhi kemunduran bisnis bioskop ialah yang berhubungan dengan buruknya pengelolaan dan sistem distributor yang buruk. Pada tahun 1990-an mulai dirasakan kelesuan terhadap bisnis film dan bioskop di Indonesia.

Faktor eksternal yang membuat kemunduran bisnis bioskop ini ialah : Munculnya siaran televisi, terutama munculnya televisi swasta yang memberikan hiburan lebih hemat dan juga praktis untuk masyarakat, Maraknya peredaran VCD bajakan yang diperjual bebaskan dengan harga yang sangat murah ditengah-tengah masyarakat, Krisis moneter pada masa akhir Soeharto, kenaikan harga pada segala bidang, membuat produksi film kekuarangan pasokan film, Kurangnya perhatian dari pemerintah, karena dimasa akhir pemerintahan Soeharto banyak terjadi kekisurhan dan demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa. Beberapa faktor tersebut merupakan faktor keumnduran bioskop di Kudus, pada tahun 1990-an. Dari keadaan dtersebut banyak bioskop yang memilih untuk gulung layar karena tidak ingin mendapatkan kerugian yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abd Rahman Hamid & Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka 2001.
- Garin Nugroho, *Film Indonesia :Krisis dan Paradoks*, Jakarta: Kompas, 2015.
- Haris Jauhari (ed), *LayarPerak 90 Tahun Bioskop di Indonesia* ,Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Helius Syamsudin, *Metodologo Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Heru Effendy, *Industri Perfilman Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- J.B Kristanto, *Katalog Film Indonesia 1920-2007*, Jakarta : MALAK, 2007.
- Misbach Yusa Biran, *Sejarah Film 1900-1950 Bikin Film di Jawa*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.
- M. Sarief Arief, *Politik Film di Hindia Belanda*, Depok: Komunitas Bambu, 2009.
- Novi Kurnia, dkk, *Menguak Peta Perfilman Indonesia* , Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata REpublik Indonesia.2004.
- Taufik Abdullah, dkk., *Film Indonesia Bagian I (1900-1950)*, Jakarta: Dewan Film Nasional, 1993.

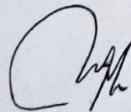
Skripsi:

- Ilmia Safitri, "Bisnis Perbioskopian di Yogyakarta Tahun 1966-1998", *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

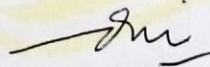
Yogyakarta, Mei 2019

Dosen Pembimbing TAS

Reviewer



Dr. Miftahuddin, M. Hum
NIP. 19740302 200312 1 006



Dina Dwikurniarini, M. Hum
NIP. 19571209 198702 2 001